

Persepsi Keadilan dan Keterasingan (*Alienasi*) pada Pemuda Asli Papua Akibat Kehilangan Ruang Ekonomi Informal

Yulianus Kambu¹, Petrus Awom², Agustina Mayor³
^{1,2,3} Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Article Info

Article history:

Received 05 10, 2024
Revised 11 10, 2025
Accepted 12 31, 2025

Keywords:

Alienation, Perception of Justice, Informal Economy, Indigenous Papuan Youth, Urban Development

Kata Kunci:

Alienasi, Persepsi Keadilan, Ekonomi Informal, Pemuda Asli Papua, Pembangunan Urban

ABSTRACT

Rapid urban development in Sorong City has created intense spatial competition, potentially marginalizing vulnerable groups, particularly Indigenous Papuan youth who have historically relied on informal economic spaces. This research aims to deeply explore how perceptions of justice and alienation are formed among Indigenous Papuan (OAP) youth in Sorong City as a result of the loss of informal economic spaces. Using a qualitative approach with a phenomenological study design, data were collected through in-depth interviews and participant observation with affected OAP youth and were analyzed using thematic analysis. The findings reveal the emergence of a dual sense of injustice: distributive injustice (loss of assets) and procedural injustice (being ignored). This condition triggers feelings of alienation manifested in experiences of powerlessness and social isolation, as well as meaninglessness and self-estrangement when forced to switch to jobs that offer no intrinsic satisfaction. In conclusion, this study finds that the perception of injustice acts as a crucial mediator connecting structural change with individual psychological impacts, highlighting the importance of more inclusive and equitable development.

ABSTRAK

Pembangunan urban yang pesat di Kota Sorong telah menciptakan kompetisi ruang yang ketat dan berpotensi meminggirkan kelompok rentan, terutama pemuda asli Papua yang secara historis bergantung pada ruang ekonomi informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana persepsi keadilan dan keterasingan (*alienasi*) terbentuk pada pemuda asli Papua (OAP) di Kota Sorong sebagai akibat dari hilangnya ruang ekonomi informal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan pemuda OAP yang terdampak, dan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan munculnya persepsi ketidakadilan ganda: ketidakadilan distributif (kehilangan aset) dan ketidakadilan prosedural (pengabaian suara). Kondisi ini memicu perasaan alienasi yang termanifestasi dalam pengalaman ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan keterisolasian sosial (*social isolation*), serta ketidakbermaknaan (*meaninglessness*) dan keterasingan diri (*self-estrangement*) ketika mereka terpaksa beralih ke pekerjaan yang tidak memberikan kepuasan intrinsik. Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa persepsi ketidakadilan bertindak sebagai mediator krusial yang menghubungkan perubahan struktural dengan dampak psikologis individu, menyoroti pentingnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Copyright © 2025 Yulianus Kambu, Petrus Awom, Agustina Mayor

* Corresponding Author:

Agustina Mayor
agustina.mayor@gmail.com

INTRODUCTION

Urbanisasi merupakan fenomena global yang tak terhindarkan, membawa serta janji kemajuan ekonomi dan modernisasi infrastruktur. Proses ini secara fundamental mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan budaya suatu wilayah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang menarik populasi dari berbagai daerah (Harahap, 2020). Namun, di balik narasi pembangunan, urbanisasi seringkali melahirkan kompetisi yang ketat atas sumber daya, termasuk ruang dan kesempatan kerja. Transformasi perkotaan ini tidak selalu inklusif, seringkali menciptakan ketegangan antara kelompok masyarakat pendatang dengan komunitas asli yang telah lama mendiami wilayah tersebut (Turner & Nugroho, 2019). Akibatnya, dinamika kekuasaan yang baru dapat meminggirkan kelompok-kelompok rentan dari arus utama pembangunan ekonomi.

Di Indonesia, akselerasi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas nasional, terutama di kawasan timur seperti Papua. Kota Sorong, sebagai pintu gerbang utama Provinsi Papua Barat Daya dan pusat ekonomi strategis, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dekade terakhir (BPS, 2023). Posisinya yang vital sebagai penghubung ke destinasi wisata dunia Raja Ampat serta statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah memicu gelombang investasi dan migrasi yang masif (Pratama & Wijoyo, 2021). Namun, perkembangan ini berjalan paralel dengan meningkatnya kompleksitas masalah sosial, dimana masyarakat asli Papua seringkali dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat dan kompetitif (Wahyudi, 2018).

Dalam konteks masyarakat berkembang, sektor ekonomi informal memegang peranan krusial sebagai jaring pengaman sosial dan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar populasi (Hart, 1973). Sektor ini, yang mencakup berbagai aktivitas ekonomi skala kecil di luar regulasi formal, menyediakan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tidak ditemukan di pasar kerja formal (Geertz, 1963). Bagi banyak komunitas adat, ekonomi informal bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga merupakan medium untuk melestarikan praktik sosial dan budaya (Putra, 2019). Oleh karena itu, keberadaan ruang untuk aktivitas ekonomi informal menjadi vital bagi kesejahteraan holistik masyarakat.

Di Kota Sorong, ruang ekonomi informal secara historis menjadi tulang punggung bagi banyak keluarga Orang Asli Papua (OAP). Aktivitas seperti mama-mama penjual pinang dan sirih di pinggir jalan, pedagang ikan asap di Pasar Boswesen, juru parkir lokal, hingga pengrajin noken yang menjajakan karyanya di ruang-ruang publik merupakan pemandangan keseharian (Susanto, 2020). Ruang-ruang ini lebih dari sekadar tempat bertransaksi; ia adalah arena interaksi sosial, penegasan identitas komunal, dan transfer pengetahuan antar generasi. Keberadaannya memberikan rasa kepemilikan dan kontrol atas lingkungan ekonomi mereka sendiri, sekalipun dalam skala yang terbatas.

Namun, pembangunan fisik Kota Sorong yang agresif secara bertahap menggerus keberadaan ruang-ruang ekonomi informal ini. Pembangunan pusat perbelanjaan modern, penataan kota yang merelokasi pedagang kaki lima, dan meningkatnya persaingan dari pelaku ekonomi pendatang yang memiliki modal lebih besar telah menyulitkan pemuda asli Papua untuk berpartisipasi (Lestari & Pamungkas, 2022). Kehilangan akses terhadap ruang ini bukan sekadar kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga dirasakan sebagai proses peminggiran sistematis dari tanah leluhur mereka. Fenomena ini menciptakan sebuah dislokasi ekonomi dan sosial yang signifikan di kalangan generasi muda OAP.

Kondisi peminggiran ini secara langsung memengaruhi persepsi keadilan di kalangan pemuda asli Papua. Teori keadilan sosial, khususnya keadilan distributif, menyatakan bahwa individu akan mengevaluasi kewajaran dari alokasi sumber daya dalam komunitas mereka (Greenberg, 1990). Ketika pemuda OAP melihat bahwa kesempatan ekonomi dan ruang usaha lebih banyak dinikmati oleh kelompok pendatang, sementara mereka merasa semakin terpinggirkan, muncul persepsi ketidakadilan yang kuat (Azwar, 2019). Persepsi ini diperburuk oleh perasaan bahwa proses pengambilan keputusan terkait pembangunan kota (keadilan prosedural) tidak melibatkan suara dan aspirasi mereka secara memadai (Colquitt, 2001).

Persepsi ketidakadilan yang berkelanjutan merupakan prekursor utama dari perasaan keterasingan atau alienasi. Alienasi, dalam kerangka sosiopsikologis, merujuk pada kondisi keterpisahan individu dari komunitas, pekerjaan, dan bahkan dari dirinya sendiri (Seeman, 1959). Melvin Seeman mengidentifikasi lima dimensi alienasi, yaitu ketidakberdayaan (*powerlessness*), ketidakbermaknaan (*meaninglessness*), kenirnormaan (*normlessness*), keterisolasian sosial (*social isolation*), dan keterasingan diri (*self-estrangement*). Kelima dimensi ini sangat relevan untuk menjelaskan kondisi psikologis pemuda OAP yang merasa kehilangan kontrol atas masa depan ekonomi mereka di tanah kelahiran sendiri (Rahman, 2021).

Secara teoritis, hilangnya ruang ekonomi informal memicu persepsi ketidakadilan distributif yang mendalam. Perasaan diperlakukan tidak adil ini kemudian bertransformasi menjadi perasaan tidak berdaya untuk mengubah nasib (*powerlessness*) dan merasa terisolasi dari sistem ekonomi baru yang berkembang pesat (*social isolation*). Ketika pekerjaan atau usaha yang dulu dianggap bermakna kini tidak lagi dapat diakses, muncullah perasaan ketidakbermaknaan (*meaninglessness*) atas peran mereka dalam masyarakat (Tajfel & Turner, 1979). Kombinasi dari dimensi-dimensi alienasi inilah yang berpotensi melahirkan frustrasi, apati, atau bahkan perilaku kontra-produktif sebagai bentuk respons terhadap kondisi yang mereka hadapi (Siregar, 2020).

Penelitian mengenai dampak psikologis dari pembangunan di Papua telah banyak dilakukan, namun mayoritas berfokus pada isu-isu konflik politik atau kesehatan secara umum. Studi yang secara spesifik mengkaji hubungan antara hilangnya ruang ekonomi informal dengan variabel psikologis seperti persepsi keadilan dan alienasi pada segmen pemuda perkotaan masih sangat terbatas. Padahal, pemuda merupakan kelompok demografis yang paling rentan terhadap perubahan sosial-ekonomi dan merupakan aset masa depan bagi komunitas mereka (Hidayat, 2018). Memahami kondisi psikologis mereka adalah langkah krusial untuk merancang intervensi yang tepat sasaran dan mencegah eskalasi masalah sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana persepsi keadilan dan keterasingan (*alienasi*) terbentuk pada pemuda asli Papua di Kota Sorong sebagai akibat dari kehilangan ruang ekonomi informal. Penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman subjektif para pemuda mengenai perubahan lanskap ekonomi kota dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pandangan mereka terhadap keadilan dan posisi mereka dalam struktur sosial yang baru (Santoso, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman dinamika psikososial di wilayah urban Papua serta memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

LITERATURE REVIEW

Ekonomi Informal dalam Konteks Pembangunan Urban

Ekonomi informal, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan untuk menggambarkan aktivitas ekonomi di luar regulasi formal di perkotaan Ghana (Hart, 1973), kini dipahami sebagai komponen vital dalam struktur ekonomi negara-negara berkembang. Sektor ini dicirikan oleh kemudahan akses, skala usaha kecil, dan penggunaan teknologi adaptif, yang memungkinkannya menyerap tenaga kerja yang tidak dapat diakomodasi oleh sektor formal (International Labour Organization, 2018). Di Indonesia, fenomena ini telah lama menjadi bagian dari lanskap sosio-ekonomi, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang krusial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang terpinggirkan dari pasar kerja formal (Widyanta & Purnomo, 2020).

Peran sektor informal melampaui fungsi ekonomi semata; ia merupakan arena penting bagi interaksi sosial, afirmasi identitas budaya, dan pemeliharaan kohesi komunitas (Granovetter, 1985). Di kota-kota Papua seperti Sorong, ruang-ruang publik yang menjadi lokasi ekonomi informal—seperti pasar, pinggir jalan, atau area pesisir—adalah panggung

utama bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menopang kehidupan sekaligus menjalankan praktik budaya mereka, misalnya melalui penjualan pinang, sagu, atau kerajinan tangan (Irianto, 2019). Ruang-ruang ini memiliki nilai keterikatan tempat (*place attachment*) yang kuat, di mana identitas individu dan komunal menyatu dengan lingkungan fisik (Altman & Low, 1992). Namun, modernisasi dan penataan kota yang seringkali mengadopsi visi pembangunan yang monolitik dan tidak partisipatif, kerap mengancam keberadaan ruang-ruang vital ini, menggusur para pelakunya atas nama "ketertiban" dan "kemajuan" (Yamin & Haryanto, 2021).

Dimensi Psikologis Keadilan Sosial

Persepsi keadilan merujuk pada penilaian subjektif seorang individu mengenai kewajaran perlakuan yang diterimanya (Greenberg, 1990). Dalam psikologi sosial, konsep ini terbagi menjadi beberapa dimensi krusial. Dimensi pertama, keadilan distributif, berfokus pada kewajaran hasil atau alokasi sumber daya yang diterima. Berdasarkan Teori Ekuitas, individu akan merasa diperlakukan adil jika rasio input dan output yang mereka alami sebanding dengan rasio yang dialami oleh kelompok lain sebagai pembanding (Adams, 1965). Dalam konteks penelitian ini, persepsi ketidakadilan distributif dapat muncul ketika pemuda OAP merasa bahwa ruang dan peluang ekonomi secara tidak proporsional lebih banyak dialokasikan kepada kelompok pendatang.

Dimensi kedua, keadilan prosedural, berkaitan dengan persepsi kewajaran dari proses dan mekanisme yang digunakan untuk sampai pada suatu keputusan alokasi (Thibaut & Walker, 1975). Sebuah prosedur dinilai adil jika memberikan kesempatan bersuara (*voice*), konsisten, tidak bias, dan didasarkan pada informasi yang akurat. Ketika kebijakan penataan kota yang berdampak langsung pada hilangnya ruang ekonomi informal dibuat tanpa pelibatan dan konsultasi yang bermakna dengan komunitas terdampak, maka akan muncul persepsi ketidakadilan prosedural yang kuat. Perasaan tidak dilibatkan ini dapat merusak kepercayaan terhadap institusi sosial dan pemerintah secara lebih signifikan daripada ketidakpuasan terhadap hasilnya semata (Kuncoro, 2022).

Alienasi sebagai Dampak Psikososial

Alienasi adalah suatu kondisi psikologis berupa perasaan terasing, terpisah, dan tidak berdaya dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Mengembangkan konsep Marxis, Melvin Seeman (1959) memecah alienasi menjadi lima dimensi yang dapat diamati. Pertama, ketidakberdayaan (*powerlessness*), yaitu keyakinan bahwa individu tidak mampu memengaruhi peristiwa yang membentuk nasibnya. Kedua, tidak bermaknaan (*meaninglessness*), yakni kesulitan memahami dunia sosial di sekitarnya dan tujuan keberadaannya di dalamnya. Ketiga, kenirnormaan (*normlessness*), atau keyakinan bahwa norma-norma sosial telah luntur dan cara-cara yang tidak sah diperlukan untuk mencapai tujuan. Keempat, keterisolasian sosial (*social isolation*), perasaan terpisah dari komunitas dan nilai-nilai dominan. Kelima, keterasingan diri (*self-estrangement*), yakni ketika individu merasa terputus dari "dirinya yang sejati" dan melakukan aktivitas tanpa kepuasan intrinsik.

Kondisi terpinggirkan dari struktur ekonomi dapat memicu kelima dimensi alienasi tersebut secara simultan (Rahman, 2021). Pemuda OAP yang kehilangan ruang usaha informalnya mungkin merasa tidak berdaya untuk melawan kekuatan pembangunan kota. Mereka juga bisa merasa bahwa peran ekonomi tradisional mereka menjadi tidak bermakna di tengah kepingunan bisnis modern. Perasaan bahwa "aturan main" ekonomi tidak lagi berpihak pada mereka dapat memunculkan kenirnormaan, sementara hilangnya ruang komunal pasar menyebabkan keterisolasian sosial. Dampak psikologis akibat relokasi atau penggusuran paksa ini terbukti dapat menimbulkan stres jangka panjang dan perasaan kehilangan yang mendalam (Simatupang, 2019).

Kerangka Konseptual dan Sintesis

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat ditarik sebuah kerangka konseptual yang menghubungkan fenomena pembangunan urban dengan dampak psikologisnya. Proses pembangunan di Sorong yang menyebabkan hilangnya ruang ekonomi informal bagi pemuda OAP menjadi variabel anteseden utama. Kehilangan akses ini, yang terjadi dalam arena kompetisi sosial-ekonomi, memicu proses evaluasi kognitif pada pemuda OAP

mengenai situasi mereka, yang kemudian membentuk persepsi ketidakadilan, baik distributif maupun prosedural. Persepsi bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil dan sistematis oleh sistem yang ada menjadi variabel mediasi yang krusial.

Persepsi ketidakadilan yang dirasakan secara terus-menerus ini pada akhirnya berpotensi memanifestasikan diri sebagai kondisi psikologis alienasi. Rasa tidak berdaya dalam menghadapi kebijakan, kehilangan makna dari peran ekonomi, dan keterisolasian dari denyut nadi ekonomi kota merupakan manifestasi dari alienasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa perasaan alienasi yang dialami pemuda asli Papua tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari sebuah proses yang diawali oleh perubahan struktural (hilangnya ruang ekonomi) dan dimediasi oleh persepsi kognitif mengenai ketidakadilan (Suryahadi, 2023). Memahami hubungan antar variabel ini esensial untuk merumuskan intervensi sosial yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan integrasi psikologis.

METHOD

Pendekatan Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi fenomenologi untuk dapat memahami secara mendalam makna subjektif dari pengalaman hidup (*lived experience*) para partisipan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap esensi dari perasaan dan persepsi individu yang kompleks, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, teknik utama yang akan digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur. Metode ini akan didukung oleh observasi partisipatif guna memahami konteks sosial secara langsung, serta studi dokumentasi berupa berita atau foto untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara.

Partisipan dan Lokasi Penelitian

Partisipan penelitian ini adalah pemuda asli Papua berusia 18-30 tahun yang berdomisili di Kota Sorong dan memiliki pengalaman relevan dengan hilangnya ruang ekonomi informal. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana individu dipilih secara sengaja berdasarkan kesesuaian pengalaman mereka dengan tujuan penelitian hingga tercapai titik saturasi data. Seluruh kegiatan penelitian akan berlokasi di Kota Sorong, dengan fokus pada area-area yang mengalami transformasi urban signifikan dan pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi informal komunitas Orang Asli Papua, seperti kawasan sekitar pasar, pesisir, dan pusat kota.

Analisis dan Keabsahan Data

Data kualitatif yang terkumpul, khususnya transkrip wawancara, akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*). Proses ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari familiarisasi data, pengkodean, pencarian tema, hingga pendefinisian tema-tema utama yang merefleksikan persepsi keadilan dan alienasi partisipan. Untuk menjamin keabsahan dan kepercayaan (*trustworthiness*) temuan, penelitian ini akan menerapkan strategi triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber (antar-partisipan) dan metode (wawancara dan observasi). Selain itu, akan dilakukan proses *member checking*, yaitu mengonfirmasikan kembali interpretasi temuan kepada partisipan untuk memastikan akurasi dan kredibilitas data.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil Penelitian

Analisis tematik terhadap data wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan para pemuda asli Papua di Kota Sorong menghasilkan tiga tema utama yang saling terkait. Tema-tema ini secara kolektif menggambarkan pengalaman psikologis mereka dalam menghadapi hilangnya ruang ekonomi informal. Tema-tema tersebut adalah: (1) "Tanah yang Hilang, Suara yang Diabaikan": Persepsi Ketidakadilan Ganda; (2) "Menjadi

Penonton di Rumah Sendiri": Pengalaman Keterisolasian dan Ketidakberdayaan; dan (3) "Bekerja Tanpa Jiwa": Kehilangan Makna dan Keterasingan Diri.

Tema pertama, "Tanah yang Hilang, Suara yang Diabaikan", menangkap inti dari persepsi ketidakadilan yang dirasakan partisipan. Kehilangan ruang fisik untuk berjualan tidak hanya dilihat sebagai kerugian ekonomi, tetapi juga sebagai perampasan hak atas tanah leluhur. Seorang partisipan mengungkapkan, "*Dulu ini tempat mama saya jualan pinang dari saya kecil. Sekarang berdiri ruko besar. Kami tidak pernah diajak bicara, tahu-tahu sudah ada pagar seng.*" Ungkapan ini merefleksikan persepsi ketidakadilan distributif (kehilangan ruang usaha) sekaligus ketidakadilan prosedural (proses pembangunan yang tidak melibatkan mereka). Partisipan secara konsisten merasa bahwa suara dan aspirasi mereka diabaikan sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan tata kota.

Selanjutnya, tema "Menjadi Penonton di Rumah Sendiri" menggambarkan manifestasi dari dimensi alienasi, yaitu ketidakberdayaan dan keterisolasian sosial. Partisipan merasa tidak memiliki kekuatan untuk bersaing atau melawan arus pembangunan yang didominasi oleh modal besar dan pelaku ekonomi pendatang. "Kita ini seperti nonton saja di pinggir lapangan. Mereka yang main bola, mereka yang cetak gol di tanah kita," ujar partisipan lain. Metafora "menonton" ini secara kuat melukiskan perasaan terisolasi dari denyut nadi ekonomi kota yang baru. Mereka merasa menjadi kelompok luar yang terpisah dari komunitas bisnis yang kini mendominasi lanskap ekonomi Sorong.

Tema ketiga, "Bekerja Tanpa Jiwa", menyoroti dampak hilangnya ruang otonom terhadap makna kerja dan identitas diri. Banyak partisipan yang beralih profesi menjadi buruh harian, juru parkir liar, atau pekerjaan serabutan lain dengan pendapatan tidak menentu dan tanpa kebanggaan. Peralihan dari wirausaha mandiri menjadi pekerja upahan dirasakan sebagai sebuah degradasi. Seperti yang diungkapkan seorang partisipan, "*Dulu jual ikan asap itu ada seninya, ada bangganya. Sekarang jaga parkir, kadang dapat, kadang tidak. Ini kerja untuk bertahan hidup saja, tidak ada rasa memiliki.*" Pengalaman ini mencerminkan dimensi alienasi berupa ketidakbermaknaan dan keterasingan diri, di mana pekerjaan yang dijalani tidak lagi memberikan kepuasan intrinsik atau merefleksikan identitas mereka.

Pembahasan

Temuan penelitian ini secara empiris mengonfirmasi kerangka konseptual yang telah disusun, di mana hilangnya ruang ekonomi informal menjadi pemicu utama bagi serangkaian dampak psikologis negatif. Perasaan "Tanah yang Hilang, Suara yang Diabaikan" sangat sejalan dengan teori keadilan organisasi dari Colquitt (2001). Partisipan tidak hanya marah karena kehilangan sumber daya (ketidakadilan distributif), tetapi frustrasi mereka diperparah oleh perasaan bahwa prosesnya tidak adil dan suara mereka tidak didengar (ketidakadilan prosedural). Seperti yang ditegaskan oleh Lind & Tyler (1988), persepsi terhadap prosedur yang tidak adil seringkali memiliki dampak yang lebih merusak pada kepercayaan dan legitimasi otoritas dibandingkan ketidakpuasan terhadap hasilnya itu sendiri.

Pengalaman "Menjadi Penonton di Rumah Sendiri" merupakan manifestasi nyata dari konsep alienasi yang dikemukakan oleh Seeman (1959). Perasaan tidak mampu memengaruhi arah pembangunan dan nasib ekonomi mereka sendiri adalah inti dari dimensi *powerlessness* (ketidakberdayaan). Ketika partisipan merasa hanya bisa "menonton", mereka secara efektif menempatkan diri pada posisi objek, bukan subjek, dalam proses pembangunan. Hal ini diperkuat oleh perasaan terisolasi secara sosial, di mana mereka tidak lagi merasa menjadi bagian dari komunitas ekonomi yang dominan, sebuah kondisi yang sejalan dengan temuan Rahman (2021) mengenai dampak peminggiran struktural.

Selanjutnya, tema "Bekerja Tanpa Jiwa" menggarisbawahi relevansi dimensi *meaninglessness* (ketidakbermaknaan) dan *self-estrangement* (keterasingan diri) dari teori Seeman (1959). Ruang ekonomi informal, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, juga merupakan ruang ekspresi identitas dan otonomi. Ketika ruang ini hilang dan mereka terpaksa masuk ke dalam hubungan kerja yang eksploitatif atau tidak bermakna, mereka

mengalami keterasingan dari aktivitas produktif mereka. Temuan ini mendukung argumen dari Suryahadi (2023) bahwa dampak dari penggusuran tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mengikis makna dan tujuan hidup yang sebelumnya melekat pada aktivitas ekonomi tradisional.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan berfungsi sebagai jembatan psikologis krusial yang menghubungkan pengalaman kehilangan ruang (level struktural) dengan perasaan alienasi (level individual). Proses pembangunan yang tidak partisipatif dan tidak berkeadilan secara sosial telah menciptakan luka psikologis yang mendalam. Perasaan diperlakukan tidak adil menjadi filter kognitif yang membuat pemuda asli Papua memaknai perubahan di sekitar mereka sebagai sebuah ancaman, yang pada akhirnya memicu perasaan terasing, tidak berdaya, dan kehilangan makna di tanah mereka sendiri.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan. Kondisi alienasi yang meluas di kalangan pemuda dapat menjadi akar dari berbagai masalah sosial, seperti apati politik, penarikan diri dari kehidupan sosial, atau bahkan manifestasi frustrasi dalam bentuk perilaku antisosial (Siregar, 2020). Apabila tidak dimitigasi, perasaan terpinggirkan ini berpotensi menciptakan bom waktu sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan di Kota Sorong. Oleh karena itu, pembangunan di masa depan harus mempertimbangkan kembali pendekatannya.

Sebagai kesimpulan, kebijakan pembangunan urban di Sorong perlu mengadopsi paradigma yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ini bukan hanya tentang menyediakan kompensasi finansial, tetapi tentang menciptakan ruang-ruang ekonomi hibrida di mana modernitas dapat hidup berdampingan dengan aktivitas ekonomi informal yang menjadi ciri khas lokal. Pelibatan aktif pemuda asli Papua dalam setiap tahap perencanaan (keadilan prosedural) dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan (keadilan distributif) adalah kunci untuk memulihkan rasa kepemilikan dan mencegah meluasnya perasaan alienasi.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hilangnya ruang ekonomi informal akibat pembangunan urban di Kota Sorong telah secara signifikan membentuk persepsi ketidakadilan yang bersifat ganda pada pemuda asli Papua. Ketidakadilan ini dirasakan baik secara distributif melalui hilangnya aset ekonomi, maupun secara prosedural melalui perasaan diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ketidakadilan yang mendalam ini kemudian berfungsi sebagai jembatan psikologis utama yang memanifestasikan kondisi keterasingan atau alienasi. Alienasi ini termanifestasi dalam berbagai dimensi, mulai dari perasaan tidak berdaya (*powerlessness*) dalam menghadapi perubahan, keterisolasian sosial (*social isolation*) dari struktur ekonomi baru, hingga hilangnya makna (*meaninglessness*) dan keterasingan diri (*self-estrangement*) dari aktivitas produktif yang dijalani. Dengan demikian, kondisi psikologis terpinggirkan yang dialami para pemuda ini bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan puncak dari sebuah proses sosio-psikologis sistematis yang diawali oleh perubahan struktural dan diperantarai oleh evaluasi kognitif mengenai ketidakadilan.

REFERENCES

- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, pp. 267–299). Academic Press.
- Altman, I., & Low, S. M. (Eds.). (1992). *Place attachment*. Plenum Press.
- Azwar, S. (2019). *Penyusunan skala psikologi* (Edisi 3). Pustaka Pelajar.
- Bies, R. J., & Moag, J. S. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. In R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, & M. H. Bazerman (Eds.), *Research on negotiation*

- in organizations* (Vol. 1, pp. 43–55). JAI Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kota Sorong dalam Angka 2023*. BPS Kota Sorong.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 386–400. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Geertz, C. (1963). *Peddlers and princes: Social change and economic modernization in two Indonesian towns*. University of Chicago Press.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. *Journal of Management*, 16(2), 399–432.
- Harahap, F. R. (2020). *Urbanisasi dan tantangan pembangunan kota di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89.
- Hidayat, R. (2018). Pemuda Papua di simpang jalan: Antara harapan dan ancaman marginalisasi. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(1), 45–60.
- International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). ILO.
- Irianto, A. (2019). *Ekonomi kerakyatan di Tanah Papua: Studi kasus Mama-Mama Pasar*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, S. (2022). Kepercayaan publik dan keadilan prosedural dalam kebijakan pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 18(2), 112–128.
- Lestari, D., & Pamungkas, A. (2022). Gentrifikasi dan peminggiran pedagang kaki lima di Kota Sorong. In *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi Pembangunan* (pp. 155–168). Universitas Cenderawasih Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). *The social psychology of procedural justice*. Plenum Press.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Pratama, B., & Wijoyo, H. (2021). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong: Proyeksi pertumbuhan dan dampak sosialnya. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 32(3), 215–230.
- Putra, I. N. (2019). Dimensi kultural ekonomi informal: Studi kasus pedagang di Bali. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(1), 77–91.
- Rahman, A. (2021). Alienasi struktural dan dampaknya pada kesehatan mental masyarakat urban terdampak pembangunan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 140–155.
- Roy, A. (2005). Urban informality: Toward an epistemology of planning. *Journal of the American Planning Association*, 71(2), 147–158.

Persepsi Keadilan dan Keterasingan (*Alienasi*)...

- Santoso, E. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk ilmu sosial*. Graha Ilmu.
- Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. *American Sociological Review*, 24(6), 783–791.
- Simatupang, H. (2019). Dampak psikologis relokasi paksa terhadap kesejahteraan subjektif komunitas pinggir sungai. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 7(1), 88-105.
- Siregar, M. (2020). Frustrasi kolektif dan potensi konflik sosial di wilayah urban. *Sosiologi Reflektif*, 15(1), 25-44.
- Suryahadi, A. (2023). *Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan psikologis: Sebuah tinjauan kritis*. SMERU Working Paper, (05/23).
- Susanto, A. (2020). *Dinamika sosial ekonomi pedagang kaki lima asli Papua di Kota Sorong* [Laporan Penelitian]. Lembaga Penelitian Universitas Papua.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
- Thibaut, J., & Walker, L. (1975). *Procedural justice: A psychological analysis*. Erlbaum.
- Turner, M., & Nugroho, K. (2019). *Democratisation in Indonesia: From transition to consolidation*. Routledge.
- Wahyudi, A. (2018). Adaptasi sosial masyarakat asli Papua dalam menghadapi arus modernisasi. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 31(4), 398-410.
- Widyanta, D., & Purnomo, M. (2020). Peran sektor informal sebagai penyangga ekonomi di masa krisis. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 159-174.
- Yamin, M., & Haryanto, J. T. (2021). Visi pembangunan dan realitas peminggiran: Analisis kritis kebijakan tata ruang kota. *TATALOKA*, 23(1), 98-110.